

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan Negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat. Undang-undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Melalui kemendagri No. 13 tahun 2006 implementasi paradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja dapat diterapkan dalam penyusunan APBD, baik dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, (Akbar dan Huriyat,2016).

Di era sekarang ini, pemerintah telah melakukan hal-hal penting untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang terjadi, serta upaya untuk mengakomodasi dengan berbagai tuntutan yang berkembang di daerah dan masyarakat. Dalam penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tercermin dari

kinerja organisasi sektor publik yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, dan rendah kualitas.

Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Dalam membuat anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah terlebih dulu harus memiliki renstra (perencanaan strategis) yang disusun dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemeritahan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. aspek yang diukur didalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah aspek keuangan yang berupa Anggaran Berbasis Kinerja, (Nanda dan Darwanis,2016)..

Sistem pelaporan keuangan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplemasikan anggaran yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Anastasha, 2017)

Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (Wahdatul, Rahayu, Dillak, 2016).

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan

publik secara baik dan menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik.

Dinas PU Bina Marga adalah salah satu SKPD yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan yang ada di dinas. Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga hasil dari program/kegiatan tersebut dapat dinikmati masyarakat. Terwujudnya prasarana jalan dan jembatan yang baik merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi masyarakat. Terciptanya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sehingga dapat merata dan dinikmati oleh masyarakat tentu harus didukung oleh peran serta pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai program pembangunan tersebut.

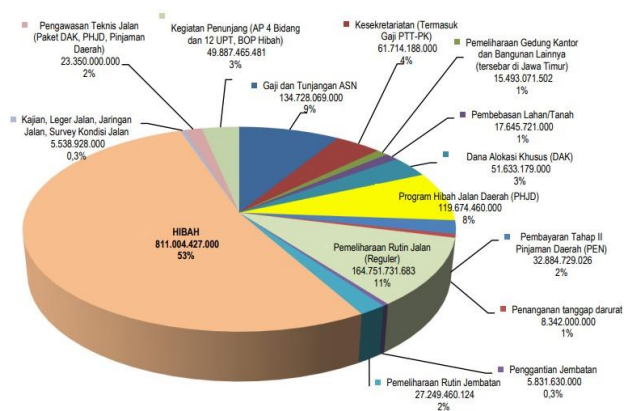
Namun dikhawatirkan, dengan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat, dikarenakan tidak efisien dalam penggunaan dan serta terjadi pemborosan anggaran yang sia-sia, sehingga hasil pembangunan dan pemeliharaan

kurang maksimal dari segi kualitas. Sekarang ini, berbagai tuntutan masyarakat tentang pembangunan dan perbaikan jalan atau jembatan, diharapkan mampu direalisasikan pemerintah melalui program-program kerjanya. Maka dengan ini tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan Pemerintah, dalam hal ini Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur semakin banyak kesiapan dalam menghadapi evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawabkan suatu instansi Pemerintah adalah dengan melihat anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan melalui perhitungan realisasi dari anggaran terhadap program-program kerja dinas yang dibiayai melalui anggaran APBD, baik dari sisi *input, output, impact, dan benefit-nya*.

Diterapkannya anggaran berbasis kinerja berharap anggaran digunakan secara optimal untuk pembangunan jalan dan jembatan dan untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah salah satu SKPD yang banyak menyerap anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan program-program dinas, tetapi masih belum efektif, sehingga diperlukan adanya pengukuran anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan untuk mengetahui sejauh mana anggaran dari rakyat tersebut digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu pentingnya penilaian kinerja anggaran untuk mengetahui apakah Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan program kerjanya dengan baik, terlebih pelaksanaan program-program yang langsung berhubungan dengan pembangunan infrastruktur

karena secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pelaporan Realisasi Anggaran pada laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 memiliki beberapa program kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan - aturan yang berlaku.



**Gambar 1.1** Komposisi Anggaran DPU Bina Marga Tahun 2021 (sumber : pelaporan Bina Marga)

Dibandingkan dengan kebutuhan alokasi anggaran sesuai dengan Renstra sebesar Rp 1.955.364.365.000,00 untuk tahun 2021 ini tingkat capaiannya sebesar Rp. 1.221.422.594.274,39 atau 62,46%.



**Gambar 1.2** Target dan Realisasi Anggaran (*sumber : pelaporan Bina Marga*)

Alokasi anggaran belanja langsung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada tahun 2021 Rp 1.521.525.320.816,00 terealisasi sebesar Rp 1.460.572.951.568,00 atau 95,99%. Melalui pelaporan diatas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada tahun 2021 tercermin pada nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah sebesar 97,44% dengan katagori capaian “Baik” serta presentase provinsi yang memenuhi targer pelayanan atau level of service sebesar 121,30% dengan capaian “Sangat Baik”. Namun terdapat beberapa yang harus di tingkatkan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, muncul ketetarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Terhadap**

## **Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah sistem pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh system pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja dan system pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan mengetahui bagaimana Akuntabilitas Kinerja di perusahaan tersebut, sehingga dapat dijadikan pandangan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

## 2. **Manfaat Praktis**

### a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan dibidang sumber daya manusia serta memahami cara menyelesaikan permasalahannya, dan meningkatkan pemahaman dalam praktek bidang akuntansi anggaran biaya dan akuntabilitas anggaran.

### b. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan

### c. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan.

### d. Bagi Pembaca

Sebagai tolak ukur untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap isu atau variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan khususnya pada siklus Akuntabilitas



Kinerja apakah berbeda pertahunnya. Selain itu juga dapat memberikan motivasi dan gambaran bagi pembaca untuk mengidentifikasi topik penelitian sebagai pembaharuan kedepannya.

*-Halaman sengaja dikosongkan-*